

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN  
KABUPATEN / KOTA .....  
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
INFRASTRUKTUR PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KEGIATAN	TARGET	DANA	LOKASI
<b>Total DAK Infrastruktur Publik</b>			<b>Rp</b>	-
<b>1.</b>	<b>Infrastruktur Jalan/Jembatan</b>		<b>Rp</b>	-
1.	Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	.....	Rp	-
2.	Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	.....	Rp	-
3.	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	.....	Rp	-
4.	Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota	.....	Rp	-
5.	Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis Daerah	.....	Rp	-
6.	Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis Daerah	.....	Rp	-
7.	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis Daerah	.....	Rp	-
8.	Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan Strategis Daerah	.....	Rp	-
<b>2.</b>	<b>Infrastruktur Irigasi</b>		<b>Rp</b>	-
1.	Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak.	.....	Rp	-
2.	Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak.	.....	Rp	-
<b>3.</b>	Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak.	.....	Rp	-

3.	<b>Infrastruktur Perumahan, Air Minum dan Sanitasi</b>		<b>Rp</b>	-
	1.	Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	..... Rp	-
	2.	Penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR (untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal)	..... Rp	-
	3.	Pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai unit pelayanan (SR)	..... Rp	-
	3.	Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;	..... Rp	-
4.	<b>Infrastruktur Perhubungan</b>		<b>Rp</b>	-
	a.	Pembangunan dermaga	..... Rp	-
	b.	Pembangunan pelabuhan lokal	..... Rp	-
5.	<b>Infrastruktur Kelautan dan Perikanan</b>		<b>Rp</b>	-
	a.	Pembangunan Bangunan Air pada Pangkalan Pendaratan Ikan	..... Rp	-
	b.	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	..... Rp	-

Tempat, tanggal  
Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**1. BIDANG TRANSPORTASI**  
**A. SUB BIDANG JALAN**

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Panjang jalan kabupaten/kota (km);		km	Merupakan total panjang jalan status provinsi berdasarkan SK Bupati/Walikota.
2	Jumlah desa yang jalan utamanya belum beraspal;		desa	Merupakan desa yang kondisi jalan utamanya belum beraspal (tanah, sirtu, macadam)
3	Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi Rusak dan rusak berat (km);		km	Merupakan total panjang jalan status kab/kota dengan kriteria rusak dan rusak berat sesuai dengan juknis DAK.
4	Kinerja jalan;		%	Merupakan pencapaian tingkat kemantapan jalan dari hasil kegiatan DAK Subbidang jalan
5	Persentase dana APBD untuk mengangani jalan kab/kota		%	Merupakan kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan pada kab/kota
6	Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT;	Ya / Tidak		Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT
7	Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas pelayanan dasar		%	Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
8	Pelaporan			Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang jalan TA 2014 pada kab/kota yang bersangkutan

Tempat, tanggal  
 Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**2. BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI**

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Luas Irigasi Kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015		Ha	Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota
2	Kondisi jaringan irigasi - Rusak Sedang - Rusak Berat		Ha	Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan Pemerintah
3	Indeks Pertanaman (Realisasi); - IP Padi - IP Total Rencana IP 2016 - IP Padi - IP Total		% % % %	Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di kab/kota yang bersangkutan terhadap total luas tanam padi kab/kota dalam satu tahun
4	Kepedulian - Dana OP - Perda Irigasi - RP2I/RPLJM - Komisi Irigasi - Tim Koordinasi		Rupiah Ada / Tidak Ada / Tidak Ada / Tidak Ada / Tidak	Terdiri dari pemenuhan dana O&P ; Perda irigasi; RPLJM (usulan DAK); komisi irigasi; dan tim koordinasi
5	Pelaporan - Laporan triwulanan tertulis tahun berjalan - Laporan e-Mon terakhir - Isian form RTI (Aplikasi e-Mon) - Progres status terakhir: a. Fisik b. Keuangan		Ada / Tidak Tanggal Ada / Tidak % %	Merupakan perbandingan nilai kerja pelaksanaan DAK Sub Bidang Irigasi TA 2014 pada kab/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Sub Bidang irigasi TA 2014 secara nasional.
6	Jumlah ketersediaan air baku (untuk kab/kota)		m3/detik	Merupakan debit air baku yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan IPA (m3/detik).

Tempat, tanggal  
Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**3. BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI**  
**A. SUB BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN**

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Memiliki unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III		Ya / Tidak	Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi perumahan.
2	Mempunyai program/kegiatan sejenis yang bersumber dari APBD		Ya / Tidak	Merupakan program/kegiatan yang sejenis dengan lingkup kegiatan DAK perumahan dan bersumber dari APBD.
3	Jumlah rumah yang ada		Unit	Merupakan jumlah rumah yang ada di kab/kota yang bersangkutan.
4	Memiliki Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		Unit	Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan mencakup komponen atap, lantai, dan dinding.
5	Termasuk daerah tertinggal, dan/atau daerah perbatasan, dan/atau pulau-pulau terluar.		Ya / Tidak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah tertinggal adalah lokasi kab/kota yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</li> <li>- Daerah perbatasan diprioritaskan pada lokasi yang tercantum pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).</li> <li>- Daerah terluar adalah Kab/kota yang memiliki daerah terluar yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> </ul>
6	Pelaporan			Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang perumahan TA 2014 pada kab/kotayang bersangkutan.

Tempat, tanggal  
 Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**3. BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI**  
**B. SUB BIDANG INFRASTRUKTUR AIR MINUM**

<b>NO.</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR (Imbr)		Rumah Tangga	Merupakan jumlah penduduk miskin di kab/kota yang bersangkutan.
2	Cakupan yang belum mendapat pelayanan air minum (Icam)		%	Merupakan persentase jumlah penduduk yang belum terfasilitasi air minum melalui PDAM/Pamsimas pada kab/kota yang bersangkutan.
3	Kapasitas belum termanfaatkan /idle capacity (Ic) dari SPAM IKK dan PDAM serta SPAM berbasis masyarakat		m3/detik	Merupakan selisih antara total kapasitas yang mampu dihasilkan oleh SPAM IKK / PDAM/SPAM berbasis masyarakat terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
4	Kinerja pelaporan (Ipl)			Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang infrastruktur air minum TA 2014 pada provinsi/kab/kota yang bersangkutan.
5	Indeks Kinerja Sambungan Rumah (SR)		%	

Tempat, tanggal  
 Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**3. BIDANG INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI**  
**C. SUB BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI**

NO.	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Cakupan pelayanan sanitasi		%	Merupakan persentase jumlah rumah tangga yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kab/kota yang bersangkutan.
2	Kesiapan program investasi, yang dilihat dari			
	a) kepemilikan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)		Ya / Tidak	Merupakan perencanaan strategis kota dalam pembangunan sektor sanitasi.
	b) Memorandum Program Sanitasi (MPS)		Ya / Tidak	Merupakan dokumen rencana pembangunan sanitasi jangka menengah.
	c) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)		Ya / Tidak	Merupakan dokumen rencana pembangunan investasi jangka menengah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
3	Kinerja Pelaporan DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi		%	Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK subbidang infrastruktur sanitasi TA 2014 pada kab/kota yang bersangkutan.

Tempat, tanggal  
 Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**4. BIDANG INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>DATA TEKNIS</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

\* Masih dalam proses penyusunan kebutuhan data teknis dari Kemenhub

Tempat, tanggal  
Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama

**DATA TEKNIS**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR PUBLIK TA. 2017**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....**

**5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Masyarakat Kelautan dan Perikanan			
	a) Jumlah Nelayan			
2	Potensi Kelautan dan Perikanan			
	a) Luas Perairan Umum Daratan (PUD)			
	b) Panjang Garis Pantai			
	c) Jumlah Pulau Kecil			
	d) Produksi Perikanan			
3	Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan			
	a) Jumlah kapal yang mendarat			
4	Laporan pelaksanaan DAK Bidang KP tahun sebelumnya			
5	Dukungan APBD SKPD bidang KP terhadap pembangunan KP			
6	Pemenuhan SPM Perikanan di daerah			

Tempat, tanggal  
Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah

Nama